PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUYONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **470841**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.355.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/100 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah Seluas 159 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 1.667 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 7.788 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
7. Tanah Seluas 16.580 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 616.700.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOTOR, KAWASAKI EX250L VARIAN 1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

4. MOTOR, HONDA F1CO2N46LD AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI
   Rp. 13.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 Tahun 2025, HASIL SENDIRI
   Rp. 551.200.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**8.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**135.519.759**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**2.115.219.759**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**129.313.592**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.985.906.167**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.